

KARAKTERISASI KELEMBAGAAN PERTANIAN DI DESA BANDAR JAYA KECAMATAN RANTAU RASAU PROVINSI JAMBI

Suharyon, Endrizal, Rustan Hadi dan Jumakir

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi

ABSTRAK

Perkembangan pertanian di suatu desa tidak terlepas dari peranan lembaga yang ada di desa bersangkutan, terutama lembaga pertanian. Berdasarkan hal itu, keragaan /dampak kelembagaan pedesaan di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan selama 3 tahun yang telah dimulai pada tahun 2002 sampai tahun 2004. Lembaga pertanian yang ditingkatkan peranannya adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta Kelompok Tani dan Masyarakat, Kepala Cabang Dinas Pertanian, KUD, Kepala Desa, Lembaga Pemasaran Hasil Pertanian, dan Peran Wanita. Kapasitas fisik yang ditingkatkan meliputi perbaikan ruang pertemuan, pemanfaatan lahan BPP sebagai pusat demonstrasi dan pembibitan tanaman pangan hortikultura dan tanaman keras. Sedangkan peranan PPL ditingkatkan dengan memberikan materi pelatihan dan praktek lapang yang bisa mendukung pengelolaan lahan pasang surut khususnya kegiatan PTT, SIPT dan Kelembagaan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT). Kelompok tani lebih diberdayakan dengan mengaktifkan pertemuan rutin setiap bulan yang membahas masalah pertanian yang dihadapi di lapangan. Agar lebih produktif, pertemuan tersebut dihadiri oleh peneliti, PPS, PPL dan tim teknis dari Pusat sebagai nara sumber dalam memperbaiki solusi pengelolaan lahan pasang surut dan lembaga-lembaga yang ada. Keragaan kelompok tani dengan adanya kegiatan SIPT melalui kredit KUM. Kredit yang diberikan kepada petani sebagai pinjaman harus dilunasi selama 6 bulan. Pengambilan kredit setiap minggu disampaikan kepada petugas lapang yang akan mendatangi rumah petani. Besarnya kredit untuk masing-masing anggota kelompok tergantung kepada besarnya modal yang tersedia dan jenis usaha yang dilakukan. Kendala yang dihadapi petani di Desa Bandar Jaya jika dilaksanakan pemeliharaan ternak sapi secara kolektif di antaranya (a) lahan untuk tempat kandang, (b) modal untuk pembelian sapi dan pembuatan kandang, (c) sistem perawatan sapi, (d) pengetahuan petani tentang penyediaan pakan terutama pada musim kemarau. Petani selalu berpendapat bahwa untuk memelihara ternak sapi harus tersedia rumput hijau.

Kata kunci : Karakteristik, kelembagaan, Desa Bandar Jaya

PENDAHULUAN

Salah satu prestasi yang telah dicapai dalam kegiatan pembangunan pertanian di Indonesia adalah tercapinya swasembada pangan pada tahun 1984. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama semua jajaran Departemen Pertanian secara terpadu yang salah satunya adalah andil dari keberhasilan lembaga pertanian. Namun demikian, diakui bahwa swasembada beras tersebut masih rentan terhadap cepatnya peningkatan permintaan beras seiring dengan laju petambahan penduduk. Jika dibahas lebih lanjut, salah satu faktor penyebab rentannya swasembada beras adalah difokuskannya produksi beras di Jawa yang lahannya relatif terbatas walaupun produktivitasnya tinggi.

Adanya persaingan penggunaan lahan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan pemukiman juga menurunkan luas garapan padi secara nyata. Selain itu, akhir-akhir ini teramati adanya kelelahan tingkat produksi (*leveling off*) di daerah sentra produksi beras. Kedua hal ini berimbas secara langsung terhadap penurunan produksi beras nasional sehingga perlu dicari solusi baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain dengan pengelolaan lahan pasang surut yang relatif luas dan memiliki potensi cukup baik sebagai sentra produksi pangan nasional. Agar pengembangan lahan pasang surut di sentra produksi yang baru ini lebih berhasil, perlu disertakan dengan penataan kelembagaan

pedesaan yang mampu mendukung kinerja petani dalam pengelolaan lahan pasang surut.

Kelembagaan merupakan sistem norma yang diperlukan oleh masyarakat untuk memupuk rasa kebersamaan dalam interaksi masyarakat. Menurut Horton dan Hunt, (1985 dalam Taryoto, 1995) kelembagaan adalah suatu sistem norma yang diperlukan untuk mencapai sejumlah tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan. Tiga konsep yang perlu diperhatikan adalah sistem nilai, prosedur hubungan sesama anggota masyarakat, serta bentuk hubungan sesama anggota masyarakat.

Adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah untuk menjadikan lahan marginal (pasang surut) sebagai sentra produksi (lambung padi) menimbulkan perubahan di dalam aspek kelembagaan pertanian di pedesaan karena perubahan aset dan strategi pengelolaan lahan pasang surut yang dimiliki petani. Hal ini sejalan dengan prinsip dari kelembagaan pertanian di pedesaan yang pada hakekatnya fungsi kelembagaan mengatur tiga masalah yaitu penguasaan, pemanfaatan, dan transfer sumber daya (Gunawan *et al.*, 1989). Agar bisa berfungsi dengan baik, kelembagaan termasuk kelembagaan pertanian haruslah cukup mapan dalam arti dapat memenuhi tuntutan informasi teknologi, pasar, dan sosial sesuai dengan perkembangan teknologi, sumberdaya biologis, kebutuhan dan preferensi masyarakat petani.

Dengan tujuan untuk membantu melancarkan fungsi dari kelembagaan pertanian, pemerintah sering campur tangan dengan memberi modal kepada kelembagaan pertanian seperti koperasi unit desa ataupun kelompok tani, berupa kredit usaha ataupun kredit usaha tani. Bentuk lainnya dari campur tangan ini adalah dibentuknya Lembaga Penyuluhan Pertanian yang melayani petani akan kebutuhan teknologi. Semua tujuan kegiatan ini agar masyarakat tani bisa memperoleh semua yang dibutuhkan dalam pengelolaan usaha taninya, sehingga bisa memperoleh hasil yang lebih tinggi. Dengan kata lain, adopsi teknologi yang memang memerlukan masukan sarana produksi dan modal bisa diadopsi lebih cepat oleh petani.

Bertolak dari kondisi tersebut di atas dan juga dengan tujuan untuk mempercepat

adopsi teknologi pengelolaan lahan pasang surut. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerjasama dengan Instansi teknis terkait lingkup Departemen Pertanian melaksanakan kegiatan Percontohan Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T). Dalam kegiatan ini akan dikembangkan model Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) Padi Sawah, Sistem Integritas Padi-Ternak (SIPT), dan Kelembagaan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT).

KERAGAAN KELEMBAGAAN DI DESA BANDAR JAYA

Koperasi Unit Desa (KUD)

Di Desa Bandar Jaya ada enam Koperasi Unit Desa (KUD) salah satunya KUD Karya Makmur, keberadaannya sangat berarti bagi masyarakat. Peranan KUD ini antara lain menyediakan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, pestisida), kebutuhan hidup sehari-hari, dan kredit uang. Namun kesulitan yang secara umum dihadapi dalam meningkatkan peranan KUD adalah rendahnya kemampuan manajemen dari pengurus KUD dan sering terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat penggunaan sarana produksi adalah kurang berfungsinya lembaga ekonomi yang ada seperti KUD dalam menyediakan sarana produksi. Di wilayah Kecamatan Rantau Rasau ada 6 KUD, dan hanya satu KUD yang aktif dalam pemasaran hasil dan menyalurkan sarana produksi, meskipun jumlahnya masih belum mencukupi. Pada kondisi tertentu pengusaha RMU berfungsi sebagai tempat pinjaman modal usahatani dan keperluan rumah tangga petani (Agus *dkk*, 2003).

Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Terdapat satu unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan 4 orang PPL dan memiliki 470 orang petani anggota dengan profesi di bidang tanaman pangan, perkebunan, ternak, dan perikanan. Sesuai dengan bidang yang dimilikinya, lembaga ini keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat petani, yang melayani petani dengan menyediakan informasi teknologi

pertanian, dan sedikit informasi pasar. Desa Bandar Jaya ini dilayani dua orang PPL (pangan, dan perkebunan.). Bimbingan ke petani dilakukan dengan sistem LAKU (latihan dan kunjungan) di lahan petani dan dengan pertemuan kelompok tani (di sawung posyandu atau balai desa) sebanyak 3 kali sebulan. Melalui dialog interaktif, petani mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan lahan pasang surut, PPL memberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.

Kelompok Tani

Untuk memupuk rasa kebersamaan dan memperlancar pengelolaan usahatani, petani membentuk organisasi kelompok tani. Di Desa Bandar Jaya terdapat 10 kelompok tani dengan jumlah anggota 20-25 orang/kelompok. Pengelompokan anggota berdasarkan hamparan lahan pangan, yang berarti satu hamparan 20-25 ha membentuk satu kelompok tani. Di antara semua kelompok dilakukan sistem gotong royong terutama untuk melaksanakan kegiatan yang memerlukan tenaga banyak yaitu saat tanam dan panen. Di dalam satu kelompok tani, ada juga yang membentuk arisan yang tidak semua anggota diwajibkan ikut, melainkan hanya beberapa anggota yang memiliki kesamaan tujuan, misalnya arisan untuk keperluan bangunan rumah, pembelian alat dan bahan pertanian, hajatan dan lain-lain.

Peranan kelompok tani cukup penting dalam penyebaran teknologi usahatani terutama lahan pasang surut melalui pertemuan kelompok tani yang dilakukan setiap bulan. Dalam pertemuan ini topik utama yang dibahas adalah kendala dan pemecahan masalah yang timbul di lapangan, antara lain : masalah hama dan penyakit, kekurangan air, masalah modal untuk pembelian saprodi dan lain-lain. Selama pertemuan teramati dialog langsung antara petani ke petani (*farmer to farmer event*) secara terbuka tentang keunggulan dan kekurangan dari teknologi baru setempat.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pedesaan

Melihat potensi sumberdaya lahan, manusia, dan kepedulian pemerintah daerah

terhadap perkembangan pertanian di Desa Bandar Jaya melalui dinas terkait, maka dilakukan peningkatan kapasitas lembaga pedesaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan adopsi teknologi pengelolaan lahan pasang surut sehingga pembangunan pertanian bisa lebih maju. Lembaga pedesaan yang ditingkatkan peranannya adalah : Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan penyuluh pertanian lapang (PPL).

Peningkatan kapasitas fisik BPP.

Semula kapasitas fisik BPP dalam penyampaian teknologi pertanian sangat terbatas dengan sarana bangunan serta perlengkapan seadanya. Kondisi ini ditingkatkan terlebih dahulu dengan memperbesar kapasitas ruang pertemuan, sehingga bisa memuat 25-30 orang, dilengkapi dengan kursi, meja dan papan tulis. Selain itu dibuat pula perpustakaan mini dilengkapi dengan rak buku. Buku bacaan ini didapatkan dari Balai-balai Penelitian dan dari Dinas-dinas terkait. Sampai sekarang buku bacaan terutama masalah pertanian sudah bisa disediakan oleh BPP bagi petani.

Selain bangunan, lahan yang dimiliki BPP juga diberdayakan sebagai pusat pengujian tanaman hortikultura (rambutan), pangan (kedele dan varietas baru padi).

Peningkatan kualitas PPL

Seiring dengan peningkatan fisik BPP, kualitas sumberdaya manusia (PPL) juga dilakukan pelatihan bagi PPL dan petani andalan. Topik pelatihan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lahan pasang surut antara lain pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Sistem Integrasi Padi dan Ternak (SIPT) dan Kelembagaan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT). Selain itu juga dilakukan pula pelatihan untuk melakukan pendekatan pedesaan dengan partisipatif (PRA) untuk memperoleh gambaran umum tentang potensi, kendala dan peluang dalam pengembangan desa.

Pemberdayaan Kelompok Tani

Sejak diterapkannya sistem pengelolaan tanaman terpadu (PTT), terlihat perubahan pertumbuhan dalam pembenihan padi sampai penanaman cukup baik, tetapi pengendalian

hama/penyakit masih menjadi kendala diwaktu air mengalami pasang surut. Hal ini berkaitan dengan masih rendahnya kemampuan petani untuk membeli saprodi. Untuk itu telah dibentuk Kredit Usaha Mandiri (KUM) bagi kelompok tani untuk pembelian saprodi, dan sebagai modal awal untuk usaha lainnya. Usaha ini membantu petani dalam meningkatkan hasil tanaman, dan meningkatkan usaha lainnya.

Selain itu, kegiatan pertemuan kelompok tani juga lebih digiatkan dengan melibatkan PPL, Peneliti, agar bisa memberikan solusi pengelolaan lahan yang lebih tepat guna. Pertemuan dihadiri oleh petani anggota kelompok, yang tertarik dengan teknologi pengelolaan tanaman terpadu. Untuk lebih meyakinkan petani yang belum mengadopsi, dilakukan dialog interaktif petani yang sudah mengadopsi, mengenai keunggulan dan kelemahan teknologi yang dianjurkan.

Lembaga Pemasaran Hasil Pertanian (LPHP)

Penjualan hasil dilaksanakan di pasar. Di Kecamatan Rantau Rasau hanya memiliki tiga pasar, yaitu berada di Desa Bandar Jaya, Harapan Makmur, dan Rantau Makmur. Walaupun di Desa lain tidak memiliki pasar ternyata tidak menjadi masalah, karena pemasaran hasil pertanian biasanya dilakukan di penggilingan padi atau oleh pedagang pengumpul yang datang ke desa. Dengan demikian penjualan hasil pertanian dilakukan petani melalui: (1) pasar terdekat, (2) pedagang perantara dan pengumpul yang datang ke desa dan (3) di pedagang pengumpul atau pengusaha RMU.

Khususnya pada usahatani padi di Desa Bandar Jaya yang hanya ditanami padi sekali setiap tahun, dan petani menjual hasil panen padinya dalam bentuk beras. Penjualan beras dilakukan di tempat penggilingan padi/RMU kepada pengusaha RMU yang merangkap sebagai pedagang pengumpul. Untuk menarik minat petani agar petani menggilingkan ke RMU-nya dan menjual berasnya kepadanya, maka pengusaha RMU ada yang memberikan fasilitas lantai jemur dan ada yang memberikan pinjaman uang kepada petani untuk pembelian sarana produksi. Pinjaman

uang untuk pembelian saprodi umumnya dibayar setelah panen.

Peranan Wanita

1. Wanita atau istri petani mempunyai peranan penting dalam sistem usahatani padi. Istri bersama suami berunding untuk menentukan waktu mulai sampai pengolahan lahan, varietas padi yang akan ditanam. Peranan wanita tani dalam usahatani padi di wilayah transmigrasi pasang surut antara lain 1) ikut menanam padi, 2) memupuk dan menyiang, 3) memanen padi, 4) merawat dan menjemur gabah.
2. Di Desa Bandar Jaya juga memiliki satu kelompok wanita tani yang cukup aktif dalam menangani pemasaran hasil bumi.

Pola Penggunaan Waktu

1. Informasi mengenai pola penggunaan waktu keluarga tani penting untuk diketahui sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jadwal pembinaan atau pertemuan dengan petani, sehingga pertemuan yang dilaksanakan tersebut tidak terlalu menyita waktu produktif petani dan supaya petugas dapat memiliki waktu yang strategis. Pemilihan atau penentuan waktu untuk pertemuan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan petani harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan petani terlalu besar.
2. Berdasarkan kelender harian keluarga petani, maka aktifitas keluarga petani dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu : (1) kegiatan mengurus keluarga di dalam rumah, dan (2) aktifitas mengurus usahatani. Aktifitas keluarga dimulai pada pukul 05.00 untuk kegiatan dalam rumah, kemudian mulai pukul 07.00 mulai kegiatan usahatani sampai pukul 16.30, dan mencari rumput dan memberi makan ternak sampai pukul 17.30. Kegiatan tersebut diselingi istirahat, sholat dan makan siang pada pukul 12.00 - 14.00. Selanjutnya mulai pukul 17.30, petani dan keluarga petani, istirahat, makan, dan sholat.

KESIMPULAN

1. Berkaitan dengan pengembangan pertanian di Desa Bandar Jaya, lembaga pedesaan seperti KUD, BPP, dan PPL, memegang peranan penting baik aspek teknis, sosial, dan ekonomi. Khusus untuk pengembangan P3T melalui PTT padi pasang surut peranan KUD dan lembaga desa sangat penting karena segala kegiatan dalam pengelolaannya dilakukan melalui KUD dan lembaga terkait lainnya.
2. BPP dan PPL sebagai lembaga ujung tombak dalam pembangunan pertanian, secara fisik telah mengalami pembenahan antara lain : meningkatkan atau mencari kapasitas ruang pertemuan menjadi 25 – 30 orang, menjadikan lahan BPP sebagai sentra demonstrasi dan kaji terap varietas unggul tanaman pangan, hortikultura, dan komoditas lainnya. Sedangkan PPL telah ditingkatkan pengetahuannya dengan melakukan pelatihan baik di Provinsi Jambi maupun di luar Provinsi Jambi, yaitu Ke Ballai Penelitian Tanaman Padi dan Sekitarnya (BALITPA Sukamandi), serta pertemuan dengan PPS, Peneliti dan nara sumber lainnya.
3. Pemberdayaan masyarakat petani dilakukan dengan melaksanakan kegiatan P3T dengan kegiatan utamanya adalah: Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT), Integrasi Sistem Padi dan Ternak (ISPT), dan Penguatan Kelembagaan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT).
4. Dengan peningkatan peranan lembaga pedesaan, teknologi lahan pasang surut dengan sistem Pengelolaan Tanaman Terpadu, dan Integrasi Padi dan Ternak dapat diadopsi oleh petani. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya petani mengikuti apresiasi PTT, SIPT, dan Kelembagaan dari berbagai disiplin ilmu.
5. Semua petani di Desa Bandar Jaya memiliki masalah yang sama, yaitu permodalan baik untuk usahatani padi, ternak maupun usaha non pertanian. Untuk itu Badan Litbang Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pertanian menyelenggarakan P3T. Selain introduksi teknologi usahatani

padi dan ternak sapi, juga memberikan modal dalam bentuk kredit uang (BLM) dengan bunga sekitar 18% per tahun atau tergantung kepada anggota kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setyono. 2003. Laporan PRA Dalam Menunjang Peningkatan Produksi Padi Terpadu di Desa Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura. 1999. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bina Usahatani dan Pengelolaan Hasil Pada Proyek PUP-TPH, P2RT-TPH, dan PSSP-TPH, TA 1999/2000.
- Dinas Pertanian Tan. Pangan Provinsi Jambi. 1999. Upaya Peningkatan Produksi Padi . Kedelei dan Jagung. TA 1999/2000 di Jambi. Makalah disampaikan Dalam Ratekcan Bimas Daerah Jambi 26 Mei 1999.
- Gunawan, M.A. Pakpahan, dan E. Pasandaran. 1989. Perubahan kelembagaan pertanian pada pasca adopsi padi unggul. Dalam Pros. Patanas. Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Badan litbang Pertanian. Bogor. Hlm. 32 – 46
- Hayami Yujiro dan Kikuchi, Masao. 1997. Dilema Ekonomi Pedesaan. Suatu Pendekatan Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Susilowati, S.H., G.S. Budhi, dan I W. Rusastra. 1997. Kinerja dan perspektif usahatani konservasi *Alley Cropping* di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi 14 (1 dan 2): 1-16. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Taryoto, A.H. 1995. Analisis Kelembagaan Dalam Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Wigena.IG.P.. 2001. Peranan kelembagaan pedesaan untuk mempercepat adopsi teknologi pengelolaan lahan kering. Prosiding Seminar Pengelolaan Lahan Kering Berlereng dan Terdegradasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Bogor 9-10 Agustus 2001.